



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/7364/KSP.00/70-74/11/2025 04 November 2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Koordinasi dan Pemantauan Indeks Pencegahan Korupsi
Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP)
pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Barat

Yth. Kepala Daerah (Daftar Terlampir)

di

Tempat

Sesuai dengan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa KPK melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menindaklanjuti Surat KPK Nomor: B/6396/KSP.00/70-74/10/2025 tanggal 08 Oktober 2025 perihal Penyelesaian Unggah Dokumen/ Bukti Pendukung IPKD MCSP 2025 dan Tindak Lanjut Rencana Aksi SPI Tahun 2024 untuk Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (terlampir), kami akan menyelenggarakan kegiatan rapat pemantauan IPKD MCSP tahun 2025 secara daring (*online*) pada :

Hari/Tanggal : Kamis/06 November 2025
Waktu : 09.30 – 12.00 WIB
Tempat & akses *link* : [Link Zoom Meeting](#)
Meeting ID: 815 0638 4601
Passcode: xkFq08Rr

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon berkenan Saudara menugaskan Sekretaris Daerah, Inspektur dan seluruh kepala perangkat daerah dan jajaran yang terkait dengan IPKD MCSP untuk hadir pada kegiatan tersebut.

Untuk koordinasi lebih lanjut silahkan menghubungi Sdr. Tri Desa Adi Nurcahyo di nomor telepon 0816-1948-694 email: tri.nurcahyo@kpk.go.id .

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

a.n. Pimpinan

Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Agung Yudha Wibowo

Tembusan:

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI;
3. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah – BPKP RI;
4. Inspektur Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lampiran

Surat Nomor : B/7364/KSP.00/70-74/11/2025

Tanggal : 04 November 2025

DAFTAR KEPALA DAERAH

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat
2. Wali Kota Pontianak
3. Wali Kota Singkawang
4. Bupati Bengkayang
5. Bupati Kapuas Hulu
6. Bupati Kayong Utara
7. Bupati Ketapang
8. Bupati Kubu Raya
9. Bupati Landak
10. Bupati Melawi
11. Bupati Mempawah
12. Bupati Sambas
13. Bupati Sanggau
14. Bupati Sekadau
15. Bupati Sintang

a.n. Pimpinan

Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Agung Yudha Wibowo